

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Berdasarkan Undang - undang No. 32 tahun 2004, memberikan defenisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk membantu dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah juga dituntut untuk

melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu good governance dan clean government.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk sesuatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu

periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Kinerja (performance) menurut kamus akuntansi manajemen dikatakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012): **“Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan”**.<sup>1</sup>

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan pada LKPJ TA 2016 merupakan pertanggungjawaban Bupati Deliserdang untuk tahun kedua RPJMD periode 2014-2019 kepada DPRD yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama TA 2016. Laporan hasil pembahasan Pansus (panitia khusus), diantaranya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2013 sebesar 9,22%, selanjutnya terus mengalami penurunan secara gradual hingga tahun 2017 dimana tingkat pertumbuhannya menjadi sebesar 5,10 %. Gejala pelemahan

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal.230

pertumbuhan ekonomi ini kiranya juga berlaku atas pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Nasional.

Dalam hal ini kinerja keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang

selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Kinerja keuangan dapat berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada LKPJ tersebut diantaranya menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari target sebesar Rp 649.175.754.000 terealisasi sebesar Rp 573.010.351.004,96 atau 88,27%, yang terdiri dari penerimaan pajak daerah dapat dicapai 87,54% Retribusi daerah sebesar 65,80%, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dicapai 95,89% dan lain-lain PAD yang sah dapat dicapai 141,68%.

Dana Perimbangan dari target sebesar Rp2.046.577.047.440 terealisasi sebesar Rp1.974.004.465.463 atau 96,45%. Transfer Pemerintah Pusat lainnya sebesar Rp35.011.114.000, terealisasi sebesar Rp35.011.114.000 atau 100%. Transfer pemerintah Provinsi dari target sebesar Rp 263.743.966.763, terealisasi Rp287.330.655.899 atau 108,94%. Lain-lain Pendapatan Daerah dari target sebesar Rp247.364.792.600. Terealisasi Rp243.268.794.000 atau 98,34% yang terdiri dari bantuan keuangan (BDB), dana hibah dan dana desa. Dengan demikian total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp3.241.872.674.803 yang terealisasi Rp3.112.343.380.366,96 atau 96%.

Dijelaskan juga bahwa untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp1.946.916.857.747 direalisasikan sebesar Rp1.829.080.248.597 atau 93,95 %,

sedangkan belanja langsung dianggarkan Rp1.437.131.719.466, direalisasikan sebesar Rp1.176.355.138.247 atau 79,60%.

Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 yang masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat yaitu sekitar 81,58%, tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 sangat rendah yaitu 22,56%, tingkat rasio efektivitas pajak daerah yang kurang efektif karena dibawah 100% yaitu 87,54%, dan kinerja rasio efektifitas keuangan daerah kurang efektif yaitu 88,26%. Dalam upaya menggali potensi PAD guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah kabupaten Deli Serdang terus bekerja keras melalui langkah-langkah konkrit antara lain memperluas basis penerimaan dengan mengidentifikasi wajib pajak baru, meningkatkan pengawasan dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak potensial, meningkatkan efisiensi administrasi dengan memperbaiki prosedur dan penyederhanaan administrasi pajak menuju pelaksanaan e-pajak berbasis WEB. Hal ini menjadikan peneliti ingin meneliti anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2019.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penelitian ini tentang Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Medan yang dilakukan oleh Takkas Dermawan Pasaribu (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dari segi

varians pendapatan dapat dikatakan tidak baik karena rata-rata tingkat pencapaian pemerintah terhadap anggaran dari tahun 2014-2017 adalah 82,8% berada dibawah 100%. Pertumbuhan pendapatan dikatakan baik karena pendapatan dari tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan yang baik, rasio efektifitas pajak daerah tidak baik karena pemerintah tidak dapat merealisasikan anggaran pajak daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan tidak baik karena tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliani Dora yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi rendah, rasio ketergantungan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio efektifitas pajak daerah sangat efisien, rasio efisiensi pajak daerah sangat efisien, rasio efisiensi belanja efisien, rasio belanja operasi pada total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan positif, rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif.

Penelitian ini menggunakan periode waktu dari tahun 2017-2019. Alasan memilih periode waktu dari tahun 2017-2019 karena data tersebut merupakan data terbaru dan belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang akan diperoleh nantinya dapat mendekati hasil atau berbeda hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil sebuah judul yaitu: **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017-2019”**. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian perlu ditegakkan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019.

Penelitian ini mengambil data dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai sumber analisis mengenai kinerja APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2019.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam peningkatan kualitas kinerja dan tingkat pelayanan terhadap masyarakat.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.

4. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang uraian teoritis mengenai pengertian keuangan daerah, pengertian kinerja, dan juga tujuan dari kinerja.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis data, sumber data, metode analisis data, teknik pengumpulan data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil analisa data penelitian dan pembahasan yang menguraikan kondisi kinerja keuangan APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang .

## **BAB V KESIMPULAN**

Berisi tentang kesimpulan mengenai analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2. 1 Keuangan Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2012), **keuangan daerah dapat diartikan sebagai berikut: “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.**<sup>2</sup>

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, tugas pengelolaan keuangan daerah adalah: menyusun rancangan Perda tentang APBD, menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan pemungutan Pendapatan

---

<sup>2</sup> Ibid, Hal.24

Daerah yang telah diatur dalam Perda, melaksanakan fungsi BUD, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengelola keuangan otonomi daerah melakukan penyimpangan seperti korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya pungutan daerah yang kontra produktif dengan upaya-upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012) ada dua yaitu :

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi**
  - 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)**
  - 2. Barang-barang inventaris milik daerah**
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>3</sup>**

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal.20

4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

## **2.2 Kinerja Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Inpres No.7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi.

Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Menurut Fahmi (2014), mengatakan bahwa **kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang**

telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Indonesia) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle) dan lainnya”.<sup>4</sup>

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat mencapai tujuan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Munawir (2010), **untuk mengetahui kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:**

- 1) **Analisis Perbandingan Laporan Keuangan**, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam presentase (relative).
- 2) **Analisis Tren (tendensi posisi)**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- 3) **Analisis Persentase per-Komponen (common size)**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- 4) **Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- 5) **Analisis Sumber dan Penggunaan Kas**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- 6) **Analisis Rasio Keuangan**, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- 7) **Analisis Perubahan Laba Kotor**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.

---

<sup>4</sup> Irham Fahmi, *Analisa Kinerja Keuangan*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hal.23

- 8) **Analisis Break Even**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.<sup>5</sup>

## 2.3 Anggaran

### 2.3.1 Pengertian Anggaran

Pengelolaan keuangan dalam suatu Negara atau daerah otonom suatu Negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan, pengawasan dan tanggungjawab terhadap pengguna dan pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh Negara atau daerah tersebut. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran yang akan dibahas dibawah ini.

Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen untuk menjalankan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Nilai suatu anggaran tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran, apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan penganggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam penetapannya, maka diperlukan cara untuk mengendalikannya yaitu dengan cara meninjau kembali penetapan anggaran sebelumnya sehingga pada saat pelaksanaan dapat terwujud serta dijadikan sebagai masukan dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut sehingga pada periode yang akan datang dapat dijadikan sebagai perbaikan positif.

Anggaran atau yang lebih sering disebut sebagai budget mempunyai defenisi yang sangat beragam, namun apabila dicermati lebih teliti masing-masing defenisi

---

<sup>5</sup> Munawir,S, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi keempat, Cetakan Kelima Belas, Yogyakarta, 2010, Hal.36

tersebut mempunyai pengertian yang sama. Secara umum, pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis., yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) **“Anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”**.<sup>6</sup>

Anggaran merupakan salah satu alat politik fiscal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran Negara yang seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran negara yang defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran Negara yang surplus.

Menurut Darise (2008) **“Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus”**.<sup>7</sup>

Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah oleh suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak

---

<sup>6</sup> Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi, **Akuntansi Pemerintahan**: In Media, 2017, Hal.129

<sup>7</sup> Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, PT.Indeks, Jakarta, 2008, Hal.133

tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun.

Menurut Sasongko dan Parulian (2010) **“Anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif, informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”**.<sup>8</sup>

Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Kemudian, anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran mempunyai empat unsur yaitu:

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu mengenai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.
2. Meliputi seluruh kegiatan suatu organisasi, yaitu mencakup semua aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada didalam perusahaan atau organisasi.
3. Dinyatakan dalam satuan unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang beranekaragam.

---

<sup>8</sup> Catur Sasongko dan Safrida Rumondang Parulian, **Anggaran**, Penerbit Salemba Empat, 2010, Hal.2

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukkan bahwa budget atau anggaran yang telah disusun berlaku untuk masa yang akan datang.

Hasil sesungguhnya dari penyusunan anggaran adalah realisasi dari anggaran yang mencerminkan efektifitas dan efisiensi dari penyusunan anggaran. Dalam realisasi akan terlihat apakah target yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak, karena realisasi tersebut dapat memperlihatkan kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi daerah. Jika target tersebut dapat tercapai maka anggaran yang disusun dinilai sangat efektif dan efisien.

### 2.3.2 Fungsi Anggaran

Menurut Darise (2008) anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1. **Anggaran merupakan pernyataan kebijakan fiscal.**
2. **Anggaran merupakan target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.**
3. **Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.**
4. **Anggaran member landasan penilaian kinerja pemerintah.**
5. **Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.<sup>9</sup>**

## 2.4 Anggaran Sektor Publik

### 2.4.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Renyowijoyo (2013) **“Anggaran sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat**

---

<sup>9</sup> Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, PT Indeks, Jakarta, 2008, Hal.133

**pertanggungjawaban kepada publik”.**<sup>10</sup> Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus memiliki manfaat bagi publik. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

#### **2.4.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik**

**Menurut Mardiasmo (2009) Anggaran sektor publik yang telah ditetapkan sebelumnya mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:**

##### **1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)**

**Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan**

---

<sup>10</sup> H. Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Edisi 3, 2013, Hal.1

dan berupa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

## 2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)

Penegendalian akuntansi sektor publik dapat dilakukan dengan cepat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
- b. Menghitung selisih anggaran.
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians.
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

## 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

## 4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Politikal Tool)

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

## 5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Melalui dokumen anggaran komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

## 6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

## 7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja sama secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

#### **8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)**

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.<sup>11</sup>

### **2.4.3 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran sektor publik dibagi menjadi 2, yaitu:

#### **1. Anggaran Operasional**

**Anggaran Operasional (operation/ recurrent budget)** Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin (*recurrent expenditure*) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, dan Pemeliharaan.

#### **2. Anggaran Modal (*capital/ investment budget*)**

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.<sup>12</sup>

## **2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **2.5.1 Anggaran Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun

<sup>11</sup> Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2009, Hal.63

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 66

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada pasal 5 ayat (2) adalah:

- 1) Pendapatan asli daerah yaitu:
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 2) Dana perimbangan
- 3) Pendapatan daerah lainnya yang sah.

#### 1) Pendapatan Asli Daerah

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) **“Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu”**.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dari masyarakat berupa hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah harus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang tiap tahunnya

---

<sup>13</sup> Amran Manurung, Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, Fakultas Ekonomi UHN, 2018, Hal. 217

meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyatadan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Peningkatan kemandirian daerah dapat dicapai dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerah tersebut. Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan elemen yang peranannya cukup kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan asli daerah terbagi atas: pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diterima dari masyarakat yang merupakan wajib pajak. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk memenuhi berbagai program-program pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dan juga sebagai bukti pengimplementasian rencana kinerja.

Menurut Siahaan (2010) **pengertian “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat .<sup>14</sup>**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan

---

<sup>14</sup> Marihot Pahala Siahaan, **Hukum Pajak Elementer**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.7

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti retribusi parkir, retribusi dari objek wisata.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan sehingga terdapat keseimbangan antara belanja dengan pendapatan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/  
BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/  
BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau  
kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Jenis pendapatan daerah lainnya yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan daerah lainnya yang sah adalah:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan
2. Penerimaan bunga giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian/kehilangan kekayaan daerah
5. Penerimaan komisi
6. Penerimaan selisih atas keuntungan nilai tukar rupiah
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

## 2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 3) Pendapatan daerah lainnya yang sah

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **2.5.2 Anggaran Belanja Daerah**

Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dari pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah: belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPD.

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) **“Belanja adalah semua pengeluaran bendahara umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah”**.<sup>15</sup>

Dalam terminology akuntansi komersial, belanja bisa disebut sebagai beban (expense) memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya (cost). Biaya adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset sedangkan beban (expense) adalah biaya yang sudah terjadi (expired). Tidak semua biaya dapat langsung dibebankan apabila biaya tersebut memiliki periode lebih dari satu tahun.

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) **“Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu”**.<sup>16</sup> Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi

---

<sup>15</sup> Opcit, Hal.125

<sup>16</sup> Opcit, Hal.237

anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

## **2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya sendiri.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki fungsi seperti:

1. Fungsi Otorisasi, yaitu APBD menjadi dasar dan pedoman pemerintah dalam menjalankan pendapatan dan belanja daerah pada tahun tersebut.
2. Fungsi Perencanaan yaitu APBD dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan program kerja dan manajemen kegiatan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Fungsi Pengawasan yaitu APBD menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi kinerja pemerintah yang bersangkutan.
4. Fungsi Alokasi yaitu APBD digunakan sebagai pengalokasian dana untuk kepentingan umum seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi yaitu APBD didistribusikan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.
6. Fungsi Stabilisasi yaitu APBD juga dapat menjadi alat yang menstabilkan ekonomi jika terjadi masalah-masalah ekstrim seperti inflasi yang meningkat tajam, pengangguran meningkat pesat, dan lain-lain. APBD dapat memelihara dan mengupayakan pemecahan masalah tersebut sehingga keseimbangan perekonomian daerah tetap terjaga.

### **2.7 Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Analisis APBD adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Analisis APBD dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu.

Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan dalam hal ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga berisi target kinerja kualitatif.

Analisa APBD dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dasarnya tidak cukup dengan hanya melihat apakah realiasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan dan belanja apa yang paling berpengaruh. Dalam menganalisa anggaran pendapatan daerah diantaranya dengan cara:

- a. Analisis Varians Pendapatan
- b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan
- c. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah
- d. Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
- e. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- f. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam menganalisa anggaran belanja daerah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Analisis Varians Belanja Daerah
- b. Analisis Pertumbuhan belanja

- c. Analisis Rasio Efisiensi Belanja
- d. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

## 2.8 Analisis Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat terganggu pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisa pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

- a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) **“Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan pendapatan daerah dinilai kurang baik”**.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010, Hal.136

**Tabel 2.1**  
**Skala Interval Varians Pendapatan**

Skala Interval (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
90-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

Untuk mengetahui varians antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan, maka digunakan rumus berikut ini:

**Analisis Pendapatan = Anggaran Pendapatan- Realisasi Pendapatan**

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100^{18}$$

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi 2010: **“Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendalai pemerintah daerah.**<sup>19</sup>

Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu dapat dihitung dengan rumus berikut:

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal.218

<sup>19</sup> Opcit, Hal 150

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{2\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%^{20}$$

Keterangan:

Th t : Tahun sekarang

Th (t-1) : Tahun sebelumnya

#### c. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%^{21}$$

#### d. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2010): **“Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang ditargetkan”**.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, Hal.220

<sup>21</sup> Ibid, Hal.226

<sup>22</sup> Opcit, Hal 143

**Tabel 2.2**  
**Skala Interval Rasio Efektivitas PAD**

Persentase (%)	Kategori
>100%	Sangat Efektif
=100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Analisa Laporan Keuangan, Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, Fakultas Ekonomi UHN Medan, 2018

Untuk mengetahui bagaimana tingkat rasio efektivitas PAD, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100^{23}$$

e. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total PAD. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau provinsi.

Menurut Kementerian Keuangan (2011), jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

---

<sup>23</sup> Ibid, Hal.225

**Tabel 2.3**  
**Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Persentase PAD Terhadap Perimbangan Daerah (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber: Surya Getsemani Sitompul, 2014

Rumus untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{PT}}{\text{TPD}} \times 100^{24}$$

Keterangan:

PT : Pendapatan Transfer

TPD: Total Pendapatan Daerah

f. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui perbandingan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu pendapatan

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal.224

transfer seperti: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman.

**Tabel 2.4**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Persentase Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25,00%	Instruktif
Rendah	25,01%-50,00%	Konsulatif
Sedang	50,01%-75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01%-100,00%	Delefgatif

Sumber: Analisa Laporan Keuangan Fakultas Ekonomi UHN Medan, Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, 2018

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100^{25}$$

## 2.9 Analisis Belanja Daerah

Analisis kinerja keuangan belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

### a. Analisis Varians Belanja Daerah

---

<sup>25</sup> Ibid, Hal.224

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran atau yang kedua justru menunjukkan sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena sudah diamanatkan dalam anggaran. Untuk mengetahui varians antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}^{26}$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Menurut Mahmudi (2010): **“Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang**

---

<sup>26</sup> Ibid, Hal.238

**relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendalai pemerintah daerah.**<sup>27</sup>

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th t} - \text{Realisasi Belanja Th t - 1}}{\text{Realisasi Belanja Th t-1}} \times 100$$
<sup>28</sup>

c. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2010): **“Analisis Rasio Efisiensi Belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat kehematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran”.**<sup>29</sup>

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$
<sup>30</sup>

d. Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio keuangan daerah maka semakin baik kinerja pemerintah.

---

<sup>27</sup> Opcit, Hal 156

<sup>28</sup> Ibid, Hal.242

<sup>29</sup> Opcit, Hal 157

<sup>30</sup> Ibid, Hal.248

**Tabel 2.5**  
**Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah**

Persentase Efisiensi	Kategori
>100%	Tidak Efektif
90,01-100%	Kurang Efektif
80,01%-90%	Cukup Efektif
60,01%-80%	Efektif
<60%	Sangat Efektif

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%^{31}$$

---

<sup>31</sup> Ibid, Hal.249

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan menjadi topik penulisan dalam usulan penelitian.

Menurut Ndraha 1985 dalam buku Prastowo (2011) **“Objek Penelitian adalah barang yang hendak diteliti oleh peneliti. Objek dalam ensiklopedia disebut sebagai sesuatu yang dengan cara tertentu dapat dikenali oleh subjek pemikir, baik sebagai suatu hal di luar subjek maupun sebagai suatu konsep atau pengertian yang dibentuk oleh subjek di dalam pikirannya”**.<sup>32</sup>

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan memperoleh data dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah tentang Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

#### 3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

##### 3.2.1 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat dipercaya. Data kuantitatif dapat dihitung atau berupa data

---

<sup>32</sup> Andi Prastowo, **Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis**, Penerbit Az-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, Hal.29

runtut waktu yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 – 2019.

## 2. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa gambaran umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja.

### 3.2.2 Sumber Data

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2017) **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.”**<sup>33</sup> Data sekunder tersebut adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode Kepustakaan

Menurut Martono (2014) **“Metode kepustakaan adalah metode yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan, jurnal akuntansi, skripsi, jurnal ilmiah, buku yang dipublikasikan**

---

<sup>33</sup> Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Meotodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, 2017, Hal.147

**maupun yang tidak dipublikasikan”.**<sup>34</sup> Untuk metode kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku teori sebagai pembantu dalam kegiatan teori permasalahan yang diteliti.

#### b. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi (2017) **“Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, botulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.”**<sup>35</sup> Dokumen yang digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data berkaitan dengan cara untuk memperoleh hasil dari data yang akan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2010) **“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain”.**<sup>36</sup>

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Comperative dan Metode Analisis Rasio. Menurut Prastowo (2011) **“Metode Analisis Comperative yaitu metode analisis yang menampilkan laporan keuangan dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran selama dua periode atau lebih, kenaikan atau penurunan tiap perkiraan, serta peresentase perubahan terhadap periode sebelumnya”.**<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Rajawali Pers, Depok, 2014, Hal. 49

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian**, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hal.274

<sup>36</sup> Sugiyono, **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Penerbit: Alfabeta 2010, Hal. 244

<sup>37</sup> Andi Prastowo, **Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis**, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, Hal.57

Analisa APBD dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dasarnya tidak cukup dengan hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan dan belanja apa yang paling berpengaruh. Dalam menganalisa anggaran pendapatan daerah diantaranya dengan cara:

- a. Analisis Varians Pendapatan
- b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan
- c. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah
- d. Analisis Rasio Efektivitas PAD
- e. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- f. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam menganalisa anggaran belanja daerah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Analisis Varians Belanja Daerah
- b. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja
- c. Analisis Rasio Efisiensi Belanja
- d. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan dianalisis dengan cara menghitung rasio keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Setelah melakukan analisis terhadap APBD, maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sehingga dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

